

**KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 060.4/146/Org.3. TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2016-2021**

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 25 Oktober 2017

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Lampiran : Keputusan Wali Kota Bontang

Nomor : 060.4/146/Org.3. Tahun 2017

Tanggal : 25 Oktober 2017

Tentang : **PERUBAHAN KEDUA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG PERIODE 2016-2021**

1. Nama Unit Organisasi : Pemerintah Kota Bontang

2. Tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD , rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan untuk Semua	1	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada thn tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
2.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan untuk Semua	3	Angka Kematian Bayi	(Jumlah kematian bayi dalam 1 tahun : Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun) x 1000	Dinas Kesehatan dan KB	Profil Kesehatan
		4	Angka Kematian Ibu	(Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun : Jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun) x 100.000	Dinas Kesehatan dan KB	Profil Kesehatan
		5	Prevalensi Balita Gizi Kurang	(Jumlah Balita gizi kurang : Jumlah balita) x 100%	Dinas Kesehatan dan KB	Profil Kesehatan
		6	Angka Harapan Hidup	Total usia penduduk meninggal : Jumlah orang meninggal pada tahun perhitungan	Dinas Kesehatan dan KB	DKPS dan BPS
3	Meningkatnya Kesejahteraan Kehidupan Sosial	7	Tingkat kemiskinan	(Jumlah penduduk miskin : Jumlah penduduk) x 100%	DSP3M	DSP3M dan BPS
		8	Tingkat Pengangguran	(Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x 100%	DPMTKPTSP	DPMTKPTSP dan BPS
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	9	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi LKIP
		10	Nilai LPPD	Nilai evaluasi LPPD	Sekretariat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi LPPD
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Laporan hasil SKM
		12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai komponen 8 area perubahan	Sekretariat Daerah	Laporan hasil IRB
		13	Nilai Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Nilai Pemingkatan e-Government Indonesia (PeGi)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan hasil PeGi
5	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Sanitasi	14	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	(Jumlah rumah tangga bersanitasi : Jumlah rumah tangga) x 100%	DPU dan PRK dan DLH	Laporan pelayanan air limbah domestik
		15	Cakupan Penanganan Sampah	(Jumlah sampah yang ditangani : Jumlah timbulan sampah) x100%	DLH	Laporan volume sampah masuk TPA
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	16	Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh	(Luas wilayah pemukiman kumuh : luas wilayah) x 100%	DPKP2	DPKP2
7	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum	17	Cakupan Pelayanan Air Minum	(Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : jumlah seluruh rumah tangga) x 100%	Dinas PU dan Tata Ruang Kota	Laporan cakupan pelayanan air minum yg dapat dilayani

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
8	Terselesaikannya Permasalahan Banjir	18	Luas Wilayah Tergenang	(Jumlah wilayah tergenang : Jumlah Luas Wilayah) x 100%	DPKP2 Dinas PU dan Tata Ruang Kota	Laporan presentasi wilayah tergenang
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Non Migas	19	Pertumbuhan PDRB Non Migas	Hasil dari penetapan BPS	DKUMP	Laporan BPS
10	Tersedianya Infrastruktur Kota yang Memadai untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Kota	20	Panjang Jalan Kondisi Baik	(Jumlah panjang jalan dalam kondisi baik : jumlah jalan keseluruhan) x 100%	Dinas PU dan Tata Ruang Kota	Laporan monitoring sarana prasarana dasar
		21	Jumlah sarana perdagangan/pasar	Jumlah sarana perdagangan/pasar yang dimodernisasi	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan DPUTRK	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan DPUTRK
		22	Jaringan gas rumah tangga	Jumlah kelurahan yang tersambung jargas	DPKP2	Laporan pelayanan instalasi Gas RT.

WALI KOTA BONTANG

NENI MOERNIAENI